
Faktor Determinan Pemerintah Singapura dalam Keberhasilannya Menanggulangi Isu Perdagangan Manusia (2009-2023)

Jasmine Zahra Farhah^{1*}, Arief Wicaksono¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa, Makassar

*Correspondence: jasminezahra06@gmail.com

Abstract

Singapore is a country known as a regional economic center with a high and good standard of living. However, despite this progress, Singapore still cannot escape the problem of human trafficking. Human trafficking is a transnational issue that occurs very often but is challenging to detect. The most common forms of human trafficking in Singapore are sex trafficking and forced labor. Singapore has made various efforts in dealing with human trafficking and has succeeded in moving up to Tier 1 in the TIP Reports since 2020. These findings will explain the factors that support Singapore's success in dealing with human trafficking from a conceptual perspective with the idea of a basic framework for combating human trafficking or "4Ps" according to the Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA) uses a descriptive qualitative method, namely containing the 4P factors, the active role of government and NGOs, cultural influences, population, and the encouragement of the national image. This research also discusses the dark side of Singapore in Human trafficking often occurs in Singapore's red-light district, Geylang, as well as the reality of forced labor, which is inversely proportional to Singapore's position in Tier 1.

Keywords: Human trafficking, sex tourism, exploitation, Singapore, TVPRA.

Abstrak

Singapura merupakan negara yang dikenal sebagai pusat perekonomian regional dan memiliki daya tarik hidup yang tinggi dan baik. Namun dibalik kemajuan tersebut, Singapura tetap tidak bisa lepas dari isu perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan isu transnasional yang sangat sering terjadi namun sulit untuk dideteksi. Bentuk perdagangan manusia yang paling umum di Singapura adalah perdagangan seks dan kerja paksa. Singapura telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan perdagangan manusia dan berhasil naik tingkat ke Tier 1 dalam *Trafficking In Person Reports (TIP Reports)* sejak tahun 2020. Adapun temuan ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Singapura dalam mengatasi perdagangan manusia yang dilihat dari segi konseptual dengan gagasan konsep *fundamental framework combating* perdagangan manusia atau "4Ps" menurut *Trafficking Victims Protection Reauthorization Act* TVPRA menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni faktor dari pemenuhan pilar 4Ps, peranan aktif pemerintah dan NGOs, pengaruh kebudayaan di tiap negara, jumlah penduduk dalam suatu negara, serta dorongan dari kepentingan *national image*. Penelitian ini juga turut membahas temuan mengenai sisi gelap Singapura dalam perdagangan manusia yang kerap terjadi di Kawasan red light district Singapura, Geylang serta realita kerja paksa yang berbanding terbalik dengan posisi Singapura di Tier 1.

Kata Kunci: perdagangan orang, sex tourism, eksploitasi, Singapura, TVPRA.

1. Pendahuluan

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional dan perbudakan modern di abad ini. Isu *human trafficking* merupakan salah satu kejahatan yang paling memalukan di dunia serta mempengaruhi hidup dan merebut martabat jutaan orang dunia yang turut mengancam hak asasi manusia di berbagai negara bahkan ketahanan keamanan dunia (polarisproject.org, nd). *Human trafficking* telah memengaruhi kurang lebih 40 juta orang yang terperangkap dalam jaringan kerja paksa, pernikahan paksa, hingga eksploitasi seksual (*ILO and Walk Free Foundation*, 2017) dan dua pertiga korban atau sekitar 25 juta orang berasal dari Asia dan Pasifik (*Walk Free Foundation's Global Slavery Index*, 2016).

TVPRA dibentuk pertama kali oleh Amerika yang merupakan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk melawan kasus human trafficking di dalam maupun di luar negeri yang kemudian melahirkan *TIP Office* dan *TIP Reports* tiap tahunnya untuk memonitor upaya tiap negara. *TIP reports* memberi peringkat bagi tiap negara dalam menangani isu Human Trafficking. Peringkat atau tier ini terbagi atas empat, yaitu:

- a) Tier 1: Negara dan wilayah yang upaya pemerintahannya telah mematuhi dan memenuhi standar TVPRA.
- b) Tier 2: Negara dan wilayah yang pemerintahannya tidak sepenuhnya mematuhi standar namun melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi standar.
- c) Tier 2 *Watchlist*: Negara dan wilayah yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum namun melakukan upaya yang signifikan untuk menyesuaikan diri dengan standar TVPRA dan perkiraan jumlah korban yang parah sangat melonjak serta tidak adanya bukti peningkatan upaya yang parah dari tahun sebelumnya.
- d) Tier 3: Negara dan wilayah yang pemerintahannya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya yang signifikan.

Salah satu negara yang menjadi titik transit populer dan pusat tujuan dalam *human trafficking* adalah Singapura. Singapura merupakan satu negara maju di Asia, yang berperan sebagai pusat perdagangan global serta memiliki kekuatan ekonomi yang sangat baik. Keberhasilan Singapura dalam memajukan negaranya, tidak menutupi fakta bahwa Singapura sangat rentan dengan kasus human trafficking. Terdapat hampir 1,37 juta pekerja asing di Singapura, dan hampir 1 juta pekerja migran berupah rendah termasuk yang paling rentan dan para korban berasal dari negara Asia Selatan dan Tenggara seperti India, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, dan Filipina (Hagar Singapore, 2018).

Pada tahun 2009-2016, Singapura mengalami kasus human trafficking yang cukup parah dan menempati tier 2 pada *TIP Reports*. Posisi Singapura di Tier 2 yang menunjukkan tingginya jumlah pekerja migran yang terindikasi perdagangan di Singapura namun minimnya usaha pemerintah dalam menanganinya. Walaupun sebelumnya Singapura pernah berada di kelompok tier 2 sejak awal *TIP Office* hingga 2019 karena tingginya kasus *human trafficking*, Singapura berhasil naik ke kelompok tier 1 pada tahun 2020 dan mempertahankan posisinya hingga laporan *TIP Reports* terakhir di tahun 2022. Posisi Singapura di Tier 1 memperlihatkan bahwa pemerintah Singapura berhasil untuk memenuhi standar minimum untuk penanganan *human trafficking* dan memperlihatkan keberhasilan pemerintah Singapura dalam menangani isu *human trafficking*.

Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisa apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemerintah Singapura dalam menangani isu *human trafficking* dalam waktu yang terbilang singkat dengan posisi sebagai destinasi populer korban *human trafficking* serta penanganannya yang dinilai berhasil dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif dalam menjelaskan faktor-faktor dari keberhasilan dan strategi pemerintah Singapura menangani isu *human trafficking* agar lebih mudah dalam memahami rumusan masalah berdasarkan konsep yang akan digunakan. Penelitian ini akan menggunakan jenis data primer yang berasal dari dokumen resmi *TIP reports* dan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal, situs web resmi, dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian ini. Contohnya seperti *TIP Reports* yang dikeluarkan oleh TVPRA, website organisasi HAM Hagar Singapura, HOME, Project X, AWARE, website resmi pemerintah Singapura, website resmi badan PBB seperti UNODC, ILO, maupun jurnal maupun publikasi terkait isu human trafficking serta hasil wawancara penyintas atau korban melalui kanal youtube maupun portal berita online. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka (*library research*) secara digital. Pengumpulan data dilakukan pada data-data sekunder seperti dokumen resmi, laporan tahunan, jurnal, buku, maupun situs-situs yang berkaitan dengan

topik yang diteliti seperti situs resmi pemerintah Singapura, situs resmi TVPRA, situs organisasi HAM, buku *Human Trafficking and the Anti-Trafficking Movement in Singapore* karya Sallie Yea maupun hasil wawancara dari berbagai narasumber dan penyintas melalui portal berita maupun penelitian. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mencari dan menyusun data yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah.

3. Faktor-Faktor Keberhasilan *Human Trafficking* di Singapura

3.1 Analisa Faktor Perdagangan Manusia di Singapura

Penanganan isu perdagangan manusia di Singapura tidak terjadi secara begitu saja dengan waktu yang cukup singkat. Upaya penanganan perdagangan manusia di Singapura dapat lebih mudah dianalisa dan dikategorikan dengan melihat dan mengelompokkan fase-fase penanganan. Fase perdagangan manusia di Singapura diawali dengan fase denial di tahun 2010 menjadi fase pertama dalam tiga fase sikap pemerintah singapura dalam menghadapi perdagangan manusia (Yea, 2020). Pemerintah Singapura dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa isu perdagangan manusia bukanlah masalah yang signifikan dan hal inilah yang menyebabkan lemahnya komitmen hukum pemerintah Singapura terhadap isu perdagangan manusia (Clarke, 2014). Dr. Sallie Yea mengatakan bahwa Singapura mempunyai masalah perdagangan manusia, yang belum tentu mereka akui. *TIP Reports* bahkan menurunkan raport Singapura dari Tier 2 menjadi *Tier 2 Watchlist* (upaya belum maksimal dan jumlah korban semakin bertambah). Penurunan ini membuat Singapura mulai mendapatkan perhatian dari dunia internasional maupun negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan mendapatkan tekanan politik internasional. Singapura akhirnya membentuk *Singapore Inter-Agency Taskforce on Trafficking in Persons* sebagai gugus tugas penanganan perdagangan manusia.

Di tahun 2011, *End Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT) International juga merilis laporan mengenai jumlah eksploitasi seksual komersial merupakan masalah yang signifikan di Singapura. Laporan tersebut juga mengeluarkan bukti-bukti termasuk narasi dari korban mengenai pemerintah Singapura yang dianggap acuh dan mengabaikan otoritas pemerintah untuk mengidentifikasi dan melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia di Singapura. Singapura juga menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang gagal meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 2000*. Singapura. Juga mengalami isu eksploitasi nelayan migran di tahun 2011-2012 dan pemerintah Singapura dianggap kurang tanggap terpadu dalam menangani dugaan perdagangan nelayan.

Fase kedua ditandai dengan posisi Singapura juga sudah naik ke Tier 2, dan mengakui perdagangan manusia merupakan suatu isu dan berkomitmen untuk mengatasinya. Singapura juga membentuk dan mengesahkan *National Plans of Action Against Human Trafficking 2012-2015* yang dibentuk oleh *Singapore Inter-Agency Taskforce* karena semakin banyak bukti yang muncul bahwa isu perdagangan manusia di singapura merupakan masalah yang penting dan harus segera ditangani . Di tahun ini juga ketentuan hukum Singapura terhadap perdagangan manusia masih sangat lemah. Warga Singapura termasuk turis seks yang paling banyak masuk ke Thailand dan Batam untuk melakukan hubungan seks tiap minggunya. Undang-undang Singapura hanya mengatur yuridiksi ekstrateritorial bagi warga negaranya dan penduduk yang mengeksploitasi anak di negara lain, namun sayangnya undang-undang ini tidak ditegakkan. Singapura tidak pernah menuntut atau menghukum warga negaranya yang melakukan perdagangan seks di luar negeri (Rachel, 2012). Professor Kirpal Singh, salah satu kritikus budaya di Singapura dan juga seorang peneliti mengatakan bahwa Singapura merupakan negara yang mengekspor wisatawan seks dan juga negara tujuan bagi para pelaku perdagangan manusia untuk mengirimkan korbannya (Singh, 2012). Singapura kemudian meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 2000* di tahun 2015 dan menjadikan Singapura sebagai negara kedua terakhir yang meratifikasi protokol perdagangan manusia ini.

Fase ketiga atau fase yang masih berlangsung hingga saat ini bermula di tahun 2017 dan ditandai dengan kelanjutan dan perluasan upaya-upaya serta inisiatif yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2012 dan 2014, namun juga dengan upaya paralel untuk menentukan parameter-parameter korban dan memperkuat pendekatan dengan masyarakat sipil yang rentan menjadi korban perdagangan manusia, seperti perempuan dan anak. *Singapore Inter-Agency Taskforce* juga kembali mengeluarkan *National Approach Against TIP 2016-2026* untuk menetapkan strategi utama dan hasil yang diharapkan sebagai panduan bagi *Singapore Inter-Agency Taskforce* dan pemangku kepentingan ketika mengembangkan rencana kerja mereka untuk memerangi isu perdagangan manusia dalam jangka panjang. *National Approach Against TIP 2016-2026* ini dikembangkan melalui konsultasi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti Organisasi Masyarakat Sipil, lembaga akademis, asosiasi bisnis dan organisasi berbasis agama serta anggota masyarakat. Perbedaan dari National Plan TIP sebelumnya mencakup kurangnya kekhususan pada Tindakan yang mendukung tujuan yang luas dan menyeluruh, dan lebih berkomitmen pada 3Ps+1P (4Ps) dibandingkan sebelumnya. Upaya Singapura terus berlanjut hingga saat ini dengan mengimplementasikan isi dari *National Approach Against TIP* dan menjalankan koordinasi dengan beberapa kementerian di Singapura dan memperlihatkan berhasilnya usaha Singapura dengan mencapai Tier 1 pada *TIP Report 2020* hingga *TIP report* terakhir di tahun 2023.

3.2 Faktor Penerapan 4Ps dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Singapura

Dalam menangani isu perdagangan manusia, Singapura memilih untuk mengadopsi ketentuan 4Ps yang disusun oleh TVPRA. *Prevention* atau pencegahan telah dilakukan oleh Singapura melalui beberapa upaya termasuk pembentukan *Singapore Inter-Agency Taskforce* sebagai panduan utama bagi Singapura dalam menghadapi isu Perdagangan manusia. Langkah pencegahan juga dilakukan Singapura dengan membentuk *National Plans of Action Against Perdagangan manusia 2012-2015*. *Action Plans* ini sendiri kembali mengadopsi pendekatan 4Ps TVPRA dalam perumusannya.

Dalam upaya pencegahan, Singapura berkomitmen untuk menciptakan kesadaran dari seluruh kalangan baik masyarakat sipil hingga pemerintah melalui pelatihan bagi pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan agar kompeten dan profesional dalam menangani isu Perdagangan manusia, serta memberi dana kepada organisasi masyarakat sipil sebesar \$160,000 untuk kampanye dan sosialisasi kesadaran public serta pelatihan modul bagi guru. Peningkatan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui media surat kabar yang mudah diakses oleh masyarakat seperti *The Straits Time*, *Lianhe Zaobao*, maupun *Berita Harian*. Singapura juga menerbitkan kebijakan jaminan kepada imigran asing yang berisi peraturan ketenagakerjaan di Singapura serta saluran yang dapat mereka gunakan untuk bantuan saat dan sebelum mereka tiba. Pemeriksaan penegakan hukum terhadap pemberi kerja dan agen tenaga kerja (mucikari) yang dicurigai atau berpotensi melakukan kejahatan juga diperketat untuk mendeteksi penipuan dan malpraktik terutama bagi imigran. Para pelaku dijerat atas hujuman dibawah Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia (PHTA) 2014.

Kesetaraan gender juga diperlukan mencegah terjadinya perdagangan manusia terutama yang menimpa perempuan dan anak. *Gender inclusivity* di Singapura juga sudah diterapkan dalam dunia kerja, dimana perempuan dan laki-laki harus setara dan memiliki hak yang sama, maupun keberagaman dalam memberi opini dan suara. Sebagai negara maju, masyarakat Singapura juga sudah semakin paham akan hal ini dan memiliki pemikiran yang lebih modern mengenai kesetaraan gender. Kalinga Seneviratne melalui *Asia Times* mengatakan bahwa Singapura telah menghasilkan tingginya angka perempuan berpendidikan dan memberi pengaruh ekonomi dan karir yang terus berkembang dan Singapura telah mengalami kemajuan kesetaraan gender yang terus membaik selama beberapa dekade terakhir.

Selanjutnya adalah *prosecution* atau penuntutan/hukuman yaitu peradilan pidana menyeluruh yang efektif terhadap kejahatan serta melibatkan investigasi dan penuntutan komprehensif terhadap

semua pelaku yang mungkin terlibat dalam perdagangan manusia atau eksploitasi korban. Singapura telah mengatur hukuman dan sanksi terkait perdagangan manusia dalam Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia (PHTA). Singapura juga mengesahkan RUU Kejahatan Terorganisir dan menaikkan hukuman berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan Asing UU Agensi. Salah satu Tindakan prosekusi Singapura terhadap perdagangan manusia yang menyita perhatian Internasional adalah ketika Singapura menghukum dan memvonis sepasang suami-istri asal India yang divonis bersalah ketika menyembunyikan perempuan migran di kelab malam mereka. Para pekerja migran tersebut mengalami kondisi yang mengesankan dan termasuk dalam perbudakan modern, seperti pelecehan verbal dan penarikan hak-hak pribadi.

Protection atau perlindungan juga dilakukan dengan tujuan perawatan dan dukungan korban yang sesuai dan memperhatikan kebutuhan semua korban perdagangan orang. Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia (PHTA) dengan memberikan perlindungan terhadap korban dibawah umur, perlindungan terhadap pelapor, melindungi identitas korban dan menyediakan layanan pendukung. Singapura juga memberikan dana bantuan terhadap tempat penampungan, layanan konseling dan perawatan korban perdagangan manusia. Terdapat pula skema pekerjaan sementara bagi korban yang bersedia dan mampu bekerja.

Singapore Inter-Agency Taskforce tak hanya bekerja sama dengan pemerintah dan kementerian Singapura, namun juga dengan organisasi masyarakat sipil dan institusi akademik. Singapura telah bekerja sama dengan negara lain untuk menginvestigasi isu-isu perdagangan manusia yang terjadi di negaranya, terutama negara asal korban. Peran NGOs juga memiliki dampak yang sangat berpengaruh dalam penuntasan perdagangan manusia di Singapura, diantara lain seperti ONE Singapore, *Association of Women for Action and Research (AWARE)* Singapore, *Justice Without Borders (JWB)* Singapore dan *HAGAR* Singapore. NGO ini sangat aktif dalam membantu para korban, memberi bantuan advokasi serta akses hukum kepada korban, mengedukasi masyarakat maupun para pekerja migran. Pemerintah Singapura bekerja sama dengan NGO dalam berbagai hal termasuk penanganan serta pelatihan perdagangan manusia, penanganan korban pekerja imigran, hingga pengaduan korban perdagangan manusia.

Beberapa NGOs yang berfokus pada hak pekerja migran seperti *Organization for Migration Economics (HOME)*, *Transit Workers Count Too (TWC2)*, maupun *Health Service* secara aktif mengadvokasi dan memberikan Pendidikan mengenai korban perdagangan manusia. NGOs Menyusun Kembali permasalahan mengenai pekerja migran yang ada dan menekankan intervensi anti perdagangan manusia dengan keyakinan yang didasari oleh kesadaran NGOs mengenai kegagalan kebijakan yang telah terjadi sebelumnya. *Singapore TIP Taskforce* juga bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil maupun Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan metode pelaporan, fasilitas di daratm dan penyampaian bantuan kemanusiaan kepada "nelayan imigran yang berada dalam kesulitan" yang menjadi korban kerja paksa (Yea, 2020).

Singapura juga belajar dan turun langsung ke lapangan bersama negara yang berada di Tier 1, seperti Amerika Serikat dan Taiwan. Partisipasi aktif dalam forum regional dan internasional juga menjadi salah satu upaya Singapura, seperti ASEAN maupun PBB, meratifikasi *The ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP)* bersama negara ASEAN lainnya untuk bekerja sama melawan perdagangan manusia terutama dalam ruang lingkup Asia Tenggara. *Singapore Inter-Agency Taskforce* juga menjajaki peluang untuk mendukung bentuk kegiatan peningkatan kapasitas lainnya seperti lokakarya pelatihan dan forum mengenai isu-isu perdagangan manusia. Singapura juga bekerja sama dengan kedutaan asing dan organisasi masyarakat untuk menjangkau pekerja migran. Keberhasilan kerja sama Singapura juga didukung oleh masyarakat Singapura yang lebih mudah menerima edukasi mengenai perdagangan manusia. Dari hasil analisis diatas, terlihat bahwa Singapura telah memenuhi seluruh indikator 4Ps yang dibentuk untuk melawan perdagangan manusia yang membuat Singapura mencapai Tier 1 dan dianggap berhasil melawan perdagangan manusia secara konseptual. Kita bisa menyimpulkan bahwa Singapura mengalami tiga fase utama

dalam penanganan perdagangan manusia yang ditandai dengan sikap dan pemerintah Singapura serta peningkatan peningkatan Tier pada *TIP Reports Singapura*.

3.3 Faktor Peranan Pemerintah dan NGOs, Budaya dan Penduduk Melalui Perbandingan Singapura, Filipina dan India

Singapura, Filipina dan India merupakan tiga negara dengan kondisi dan tier yang berbeda. Singapura sendiri termasuk negara maju dengan jumlah penduduk sebanyak 5.827.000 (Britannica, 2023) , sedangkan Filipina dan India merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk Filipina sebanyak 114.755.000 dan India sebanyak 1.370.695.000 yang telah melampaui China dan diperkirakan PBB sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia tahun 2023 (UN DESA Policy Brief No. 153, 2023). Singapura dan Filipina merupakan dua negara di Asia Tenggara yang berhasil menduduki Tier 1 di *TIP Reports* dari 188 negara. Filipina lebih dulu menduduki Tier 1 di tahun 2016, dan disusul Singapura di tahun 2020. Sedangkan India sendiri masih tetap menduduki Tier 2 hingga saat ini. Ketiga negara akan dibandingkan untuk melihat faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam mencapai Tier 1.

Filipina adalah salah satu negara sumber eksploitasi seksual anak online terbesar dengan angka yang diperkirakan mencapai 50.000 dan 5.000 diantaranya berusia dibawah 15 tahun serta dilansir dari *U.S Department of State*, Filipina sumber utama perdagangan seks dan tenaga kerja dimana pelaku mengeksploitasi anak secara seksual secara Individu atau kelompok dalam siaran langsung di internet dengan imbalan yang Sebagian besar berasal dari negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. India sendiri merupakan salah satu wilayah dengan perdagangan manusia yang berkembang dengan sangat pesat dengan hitungan perkiraan 62% dari masyarakat menjadi korban perbudakan modern. Secara keseluruhan dan dari hasil analisis , ketiga negara memiliki perbedaan latar belakang permasalahan namun secara konseptual ketiga negara tersebut telah melakukan semua usaha 4Ps sesuai dengan ketentuan yang disusun oleh TVPRA yang juga menjadi acuan negara-negara dalam menangani perdagangan manusia. Filipina dengan permasalahannya sebagai negara dengan sumber perdagangan manusia yang sangat besar , Singapura sebagai negara destinasi dan transit para korban perdagangan manusia, dan India sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia.

Filipina sendiri merupakan negara yang sangat serius dalam menangani perdagangan manusia karena menyadari hal ini juga sangat berdampak terhadap masyarakat Filipina terutama perempuan dan anak yang menjadi korban, terlihat dari keterlibatan dan keseriusan pemerintah hingga kerja sama yang aktif dengan NGOs. Keseriusan ini membuahkan hasil dengan konsistensi Filipina di Tier 1 selama 8 tahun berturut-turut. Hal ini juga turut dilakukan oleh Singapura berdasarkan hasil analisis 4Ps sebelumnya, terlihat juga keaktifan peran pemerintah dan NGOs sangat berpengaruh dalam penanganan perdagangan manusia di Singapura, yang menurut data TIP Office semakin menurun (*Phillippines TIP Reports, 2023*). Pemerintah India juga terlihat telah melakukan berbagai macam upaya, dan upaya mereka di tahun 2023 semakin serius menurut India TIP Reports 2024 walaupun Pemerintah India dinilai harus lebih tegas dalam menangani isu ini terutama dengan melibatkan keaktifan polisi nasional dalam penangkapan dan pencegahan perdagangan manusia. Tingkat hukuman atas kejahatan perdagangan manusia, termasuk kerja paksa, tetap sangat rendah, yang melemahkan pencegahan dan melemahkan upaya untuk meminta pertanggungjawaban para pedagang manusia (*India TIP Reports, 2023*).Dapat kita lihat juga bahwa Filipina sebagai negara berkembang dapat memperlihatkan keseriusannya dalam menangani perdagangan manusia dan lebih dulu berada di tingkatan Tier 1 dibandingkan Singapura yang merupakan negara maju.

Pengaruh kepadatan penduduk juga terlihat berdampak pada pengimpelentasian upaya 4Ps tiap negara. India dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan dan ketidakrataan ekonomi akan lebih sulit untuk menangani isu perdagangan manusia. Begitupun negara Filipina dengan penduduk yang lebih banyak dari Singapura, mereka memiliki upaya yang lebih lama dan kuat dibandingkan Singapura. Filipina sudah aktif dalam memerangi isu perdagangan manusia dengan serius sejak

tahun 2003 karena menyadari isu ini akan sangat membahayakan masyarakat Filipina dan butuh waktu 13 tahun hingga Filipina mencapai Tier 1. Singapura akan lebih mudah mengimplementasikan upaya 4Ps mereka dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, hal ini terlihat dari upaya Singapura yang baru secara aktif menangani perdagangan manusia di tahun 2010 dan akhirnya berhasil mencapai Tier 1 setelah 10 tahun.

NGOs yang bergerak dalam bidang perdagangan manusia juga memiliki pengaruh yang sangat besar dan membantu mendorong pemerintah dalam menangani kejahatan perdagangan manusia, dan memiliki peran yang besar dalam membantu pemerintah mengimplementasikan upaya-upaya 4Ps nya serta mewujudkan program-program yang diinisiasi oleh para NGOs. NGOs di ketiga negara terlihat sangat aktif dan memberikan data-data serta kritik yang terbuka mengenai perdagangan manusia, bahkan NGOs di India dapat dikatakan lebih aktif dalam menangani dan mencegah perdagangan manusia dibandingkan pemerintahnya sendiri. Keterlibatan penyintas juga sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan negara terkait isu perdagangan manusia agar kebijakan yang dibentuk tepat pada sasaran dan tidak hanya sekedar menjadi serangkaian kondisi yang membuat korban menjadi rentan terhadap perdagangan manusia. Dengan membentuk kebijakan yang memahami cara kerja perdagangan manusia melalui penyintas, dapat membantu membuat kebijakan yang mencegah terjadinya perdagangan manusia, membantu masyarakat untuk lebih paham mengenai siapa saja yang rentan sebelum mereka menjadi korban, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk para korban dan penyintas agar bisa membebaskan dan menyembuhkan diri serta melanjutkan kehidupan mereka.

Dari hasil Analisa ketiga negara tersebut dapat disimpulkan, bahwa beberapa faktor kesuksesan penempatan Tier 1 pada TIP reports dan pengimplementasian 4Ps dalam penanganan isu perdagangan manusia turut dipengaruhi oleh peranan aktif serta kesadaran pemerintah negara, kepadatan penduduk suatu negara, pemerataan ekonomi negara, peranan aktif NGOs, organisasi masyarakat, dan para penyintas serta lingkungan, kesadaran masyarakat dan kebudayaan suatu negara.

3.4 Faktor National Image dalam Keberhasilan Penanganan Perdagangan Manusia

Sebagai negara maju, Singapura harus mempertahankan citra baik mereka atau yang dikenal dengan "*National Image*". *International Monetary Fund* (IMF) mendefinisikan negara maju sebagai negara yang memiliki taraf hidup dan harapan hidup yang tinggi serta kualitas manusia yang sangat baik/berkualitas disebabkan oleh pemerataan ekonomi dan teknologi di setiap wilayah. *National image* sebuah negara sangatlah penting dan disebut sebagai modal politik dan ekonomi negara karena akan sangat berpengaruh di berbagai aspek terutama soft power suatu negara.

Adanya atensi dari berbagai pihak menyebabkan *National Image* Singapura kian memburuk. Singapura mendapatkan tekanan dari dunia internasional karena posisinya yang dianggap sangat rentan dalam isu perdagangan manusia. Intervensi ini berasal dari berbagai negara (terutama negara yang rentan), Amerika Serikat dan stakeholdernya, serta *TIP Office*. Amerika Serikat bahkan menyampaikan statementnya yang mengecam Tindakan Singapura yang dianggap tidak maksimal dan tidak berbuat banyak dalam menangani prostitusi dan eksploitasi tenaga kerja (asianews.it, 2010).

Ancaman terhadap national image Singapura mengenai isu perdagangan manusia ini terlihat jelas menjadi mimpi buruk bagi Singapura dan hal ini dibuktikan dengan respon pemerintah Singapura melalui *Singapore Inter-Agency Taskforce's* yang beberapa kali memberi statement resmi pemerintah dan komentar dari hasil laporan TIP Reports seperti pada tahun 2011, 2012, 2013, 2017, dan 2019. Seperti pada tahun 2010 - 2011, Singapura mengeluarkan *official detailed response* terhadap *TIP Reports* yang sangat buruk dan menyebabkan Singapura mendapatkan kecaman internasional karna dianggap acuh terhadap isu perdagangan manusia. Singapura menyangkal tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka selalu menanggapi seluruh isu kejahatan termasuk perdagangan

manusia dengan serius. Singapura membela diri mereka dengan mengatakan bahwa Singapura telah melakukan berbagai macam upaya untuk menangani perdagangan manusia sesuai dengan strategi 4Ps. Singapura bahkan mengancam data TIP Reports dan mengkritik kredibilitas *TIP Office* dengan fakta yang dianggap tidak objektif.

Hal tersebut Kembali terjadi di tahun 2012, dimana singapura masih menempati Tier 2 dan Kembali merilis official statement mereka. Isinya berupa pembelaan terhadap negara mereka, dan kritik terhadap *TIP reports*. Mereka bahkan menuntut laporan yang dianggap tidak transparan dan konsisten, serta pemerataan kerangka terukur bagi setiap negara. Setelah merilis official statement, Singapura Kembali merilis detailed statement yang berisi klarifikasi terhadap tuduhan yang diisukan pada *TIP Reports 2012* Singapura terutama mengenai pekerja asing di Singapura. Mereka bahkan menyertakan dokumen yang berisi upaya apa saja yang telah mereka lakukan sepanjang tahun untuk memerangi Perdagangan manusia.

Pada tahun 2013, Singapura Kembali merilis official statement dalam merespons *TIP Reports 2013*. Singapura mengatakan bahwa laporan ini tidak akurat dan kurangnya metodologi objektif untuk mempertimbangkan undang-undang dan konteks domestik. Terlihat kekesalan dialami oleh pemerintah Singapura dengan statement mereka yang mengatakan bahwa mereka akan tetap serius dalam menangani isu perdagangan manusia dengan atau tanpa *TIP reports*.

Pada tahun 2017, Singapura merilis *official statementnya* melalui media *The Straits Time* yang berisi sama dengan sebelumnya serta pembelaan Singapura yang mengatakan bahwa mereka telah mengadopsi *protocol Trafficking in Person PBB* pada Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia yang disahkan pada tahun 2015. *Statement* Singapura mendapatkan tanggapan dari juru bicara *TIP Office*. Juru bicara US untuk *TIP Office* mengatakan bahwa *TIP reports* tiap tahunnya sangat akurat dalam menggambarkan upaya perdagangan manusia tiap negara. Mereka juga mengatakan bahwa akan terbuka untuk berdiskusi bersama pihak Singapura untuk memastikan "Penilaian paling akurat terhadap upaya Singapura".

Di tahun 2019, Singapura Kembali merilis *official statement* melalui media yang sama, yaitu *The Straits Time*. Melalui *statementnya*, singapura tetap membela diri dan menuntut laporan *TIP reports*. Juru bicara US untuk *TIP Office* kembali menanggapi pernyataan Singapura dan mengatakan bahwa pihak berwenang Singapura mengadili pelaku dengan hukuman undang-undang lain yang lebih ringan dibandingkan aturan dari Prevention of Perdagangan manusia Act (PHTA) Singapura. Mereka juga mengatakan bahwa masih kurangnya pemahaman dari pihak berwenang mengenai indikator perdagangan manusia seperti hutang, pemaksaan psikologis, dan penipuan dan hal inilah yang menghambat penegakan *Prevention of Human Trafficking Act (PHTA)*. Hingga pada akhirnya di tahun 2020, Singapura berhasil menempati Tier 1 dan memenuhi klasifikasi penanganan perdagangan manusia sesuai dengan indikator *TIP office*.

Dari beberapa kasus tersebut terlihat bagaimana pemerintah Singapura berupaya keras dalam mempertahankan *national image* mereka dengan merilis berbagai *statement* dan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan untuk Singapura demi memperbaiki nama baik negara mereka. Bahkan di tahun 2017 dan 2019 Singapura menggunakan *The Straits Time*, yaitu media berita berbahasa Inggris yang berbasis di Singapura yang merupakan koran dengan penjualan terbanyak di Singapura serta dapat diakses secara daring oleh seluruh masyarakat Internasional di berbagai belahan dunia. Penggunaan media ini jelas bukan tanpa sebab, terutama *The Straits Time* memimpin sebagai media terkemuka di Asia. Singapura secara sadar menggunakan media massa elektronik terbesar di Singapura untuk membantah dan membela dirinya demi mempertahankan *national image* negara. Singapura dengan tanggap memperbaiki citra mereka sebagai negara maju yang harus menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, kualitas hidup yang baik dan kesejahteraan bagi seluruh warganya maupun para imigran.

Singapura bisa saja dianggap sebagai negara maju yang tidak aman dan gagal dalam menerapkan SDGs maupun mencapai kualitas hidup yang baik. Adanya stigma negatif terhadap Singapura akan sangat berpengaruh terhadap soft power dan praktik diplomasi di Singapura, dengan contoh clash yang terjadi antara Amerika Serikat dan Singapura ketika *TIP Office* merilis laporan yang dianggap tidak betul oleh pemerintah Singapura. Dapat kita lihat bahwa mempertahankan *National Image* juga menjadi salah satu faktor pendorong terkuat Singapura dalam menangani isu perdagangan manusia hingga berhasil naik ke Tier 1.

3.5 Sisi Gelap Sex dan Kerja paksa di Singapura

Secara konseptual, Singapura memang telah memenuhi seluruh upaya 4Ps dan “dianggap” berhasil dalam menangani perdagangan manusia dengan capaiannya pada Tier 1 TIP Reports. Namun, dibalik kesuksesan Singapura yang terlihat terdapat pula beberapa sisi gelap Singapura yang menjadi sasaran empuk pelaku perdagangan manusia dan fakta yang muncul dari penelitian ini, Geylang merupakan salah satu destinasi wisata dewasa 18+ legal di Singapura atau dikenal juga dengan “*red- light district*”. Geylang terkenal dengan sisi kehidupan malamnya yang juga dikenal dengan pemukiman kerja asing. Geylang dikenal sebagai “pusat dosa rahasia” di Singapura yang merupakan salah satu dari sedikit tempat yang padat penduduk dan berbagai kejahatan, pekerja seks serta obat-obatan terlarang dianggap hal yang biasa (Descalsota, 2022). Geylang memiliki kurang lebih 100 rumah bordil legal serta kios-kios yang menjual luas obat kuat atau stimulant seperti viagra maupun pil kuat. Walaupun Geylang dilegalkan oleh pemerintah Singapura, namun wisata seks ini memiliki sisi kelam yang berbahaya.

Geylang disebut sebagai rumah bagi para pekerja migran yang berasal dari berbagai negara, seperti China, Bangladesh, India, dan bahkan negara tetangga Singapura seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dll karena biaya sewa rumah dan hidup yang bisa terbilang murah. Geylang terlibat dalam beberapa isu yang bersifat kompleks dan luas, seperti human trafficking yang terdiri dari perdagangan seks dan kerja paksa. Rumah bordil Geylang dikelola oleh pemerintah Singapura yang terdiri atas tiga kementerian, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Pekerja Seks Komersial (PSK) di Geylang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan kemudian para pekerja seks akan diberikan kartu kuning atau “*Yellow card*”. *Yellow card* ini rata-rata diberikan kepada para migran dengan syarat berumur 21-35 tahun, tidak beragama muslim, KTP harus bergender perempuan, serta harus berasal dari salah satu dari lima negara yang ditetapkan yakni Vietnam, Malaysia, Singapura, China dan Thailand. Para pekerja ini diharuskan menjalani gaya hidup yang sangat ketat, bahkan paspor dan kontrak mereka ditahan oleh polisi. Mereka tidak boleh meninggalkan rumah pelacuran mereka (akan dikenakan denda dikenakan denda hingga SGD\$500), mereka dilarang menikah dengan warga Singapura, dideportasi dan dilarang masuk ke Singapura seumur hidup jika masa “*yellow card*” mereka telah selesai.

Campur tangan pemerintah maupun aturan yang ditetapkan tidak menghalangi terjadinya kasus perdagangan manusia di Geylang. Hal ini dibuktikan dengan beberapa wawancara terhadap pekerja seks dan pekerja imigran di Geylang:

- a) Seorang Numerolog asal Indonesia, Rudy Gunawan (2021) melakukan wawancara bersama salah satu pekerja seks asal Indonesia di Geylang yang diberi nama samara “Bunga”. Bunga mengatakan bahwa bayaran yang ia dapatkan hanya 60 dollar, atau sama dengan satu baju kaos pada pusat perdagangan masa kini. Bunga sendiri menjadi pekerja di Geylang demi membayar utang di kampungnya dan membiayai kehidupannya. Titel Bunga sebagai Gadis Indonesia menjadikan bunga mendapatkan bayaran termurah dan menjadikan Bunga dipandang sebelah mata dan dinilai sepertiga harga. Disebutkan pula bahwa terdapat banyak kegiatan prostitusi ilegal dan para pekerja seks nya tidak memiliki bisa kerja bahkan melibatkan beberapa negara maju seperti Jepang, Rusia, Korea, Eropa hingga Amerika (biasanya terdapat di kawasat elit dan mucikarinya tentunya bukan mucikari biasa). Terdapat berbagai tempat prostitusi ilegal yang berkedok “karaoke” maupun “spa”.

Walaupun ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu para pengunjung wajib mengisi identitas mereka pada buku tamu yang disediakan, namun ternyata identitas tersebut tidak akan dicek kebenarannya oleh pemerintah. Bunga juga merasa hak-hak yang seharusnya ia dapatkan sebagai seorang pekerja tidak terpenuhi dengan baik.

- b) Project X merupakan organisasi non-profit di Singapura yang didirikan oleh Wong Yock Leng pada tahun 2008. Wong merupakan seorang pekerja sosial yang membentuk Project X karena menyadari bahwa banyaknya pekerja seks di Singapura yang terpinggirkan, didiskriminasi bahkan menjadi korban perdagangan manusia. Data Project X menunjukkan bahwa di tahun 2021 terdapat kurang lebih 10.000 pekerja seks di Singapura, dan hanya kurang dari 1.000 orang yang terdaftar di bawah pemerintah atau mendapatkan “yellow card”.
- c) *Channel News Asia* melaporkan mengenai Sembilan perempuan Thailand yang dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan perdagangan manusia di Singapura. Mereka harus memberikan layanan seksual tanpa bayaran dan harus bekerja selama lebih dari 13 jam sehari. Mereka tidak mendapatkan izin kerja yang mereka perlukan agar bisa tinggal di Singapura dengan sah. Mereka juga menganggap bahwa hukum Singapura belum begitu adil dan melindungi para pekerja seks yang dieksploitasi ini.
- d) Sallie Yea (2020) menjelaskan hasil penelitiannya terhadap pekerja seks di Singapura dengan mewawancarai 4 orang, yaitu Rina dan Mimi dari Filipina, serta Myah dan Rani dari Indonesia. Mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan seksual seperti seks oral, cumbuah, tarian erotis bahkan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual berulang kali. Permasalahan para pekerja ini didasari oleh kebutuhan memenuhi keuangan hingga mereka menjadi korban eksploitasi. Mereka diberikan beban hutang akibat menjadi bagian dari migrasi lalu Sebagian gaji mereka tiap bulan dipotong untuk memenuhi utang tersebut. Jumlah utang mereka terhadap makelar semakin membengkak jika mereka melakukan kesalahan. Yea juga mengatakan bahwa seluruh pekerja seksual migran yang menjadi target penelitiannya tanpa terkecuali tidak diberikan kondisi hidup dan makanan yang layak, dan berpengaruh terhadap kesehatan mereka yang buruk baik fisik maupun psikis.
- e) Laporan tahunan Project X di tahun 2022 mengatakan bahwa di tahun 2022 terdapat banyak kasus penting di tahun itu yang menggambarkan kekhawatiran. Undang - undang juga terkadang gagal dalam melindungi orang - orang yang membutuhkan. Project X juga melaporkan bahwa seorang pelaku kejahatan pada pekerja seks dipenjara selama 9 tahun, walaupun kasus ini tidak dianggap sebagai kasus pemerkosaan. Kasus seperti ini merupakan pelanggaran HAM dan menyiksa para pekerja seks imigran dan lokal , kedua hal ini harus dianggap sebagai pemerkosaan dimana persetujuan dipengaruhi oleh penipuan atau tanpa consent, dan pekerja seks tidak diberikan upah atas pekerjaan mereka. Selama tahun 2022, terhadap 62.9% klien baru dan 30.8% klien lama dengan total 67 yang datang untuk meminta bantuan, baik secara hukum sebanyak 47%, finansial sebanyak 8.2%, kesehatan sebanyak 26% dan sosial 9.6%. 42 kasus dari 67 kasus termasuk 51.4% kekerasan seksual, 13.5% kekerasan finansial, 16.2% pelecehan dan 18.9% kekerasan fisik. Dari 26 kasus yang dilaporkan ke polisi, hanya 17 kasus yang ditindak lanjuti dengan persentasi 65% kasus tidak mendapatkan keadilan. Yang mengejutkan, Sebagian besar korban yang meminta bantuan Project X adalah pekerja seks Singapura, yang disusul oleh pekerja berkebangsaan Filipina, Vietnam, China, Malaysia, Thailand, Australia dan Jerman. Perlu dicatat bahwa laporan ini hanya menggambarkan Sebagian kecil dari pekerja seks di Singapura yang menghubungi project X, belum termasuk korban lainnya yang tidak mampu melapor atau membutuhkan bantuan karena rasa takut maupun ancaman yang diberikan.

Berdasarkan beberapa laporan dan wawancara diatas dapat dilihat seberapa parah kasus perdagangan manusia di Singapura terutama di kawasan “red-light district” yang menimpa para pekerja seks yang didominasi oleh perempuan dan anak dibawah umur. Posisi Singapura di Tier 1 tidak menjamin kondisi negara yang aman dari perdagangan manusia, atau bisa dikatakan sangat berbeda dengan isi laporan TVPRA Singapura. Masih ada banyak kasus perdagangan manusia yang

tidak diliput atau dianggap tidak termasuk tindakan kriminal oleh pemerintah Singapura yang kemudian menjadi mimpi buruk bagi pekerja imigran, perempuan maupun anak dibawah umur.

4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa Singapura telah melewati tiga fase dalam penanganan perdagangan manusia. Fase pertama ditandai dengan penyangkalan terhadap isu tersebut, fase kedua dengan tekanan internasional dan kesadaran pemerintah, dan fase ketiga dengan upaya dan inisiatif yang luas dari pemerintah. Singapura berhasil naik ke Tier 1, menjadikannya satu dari dua negara di Asia Tenggara yang mencapai prestasi ini. Keberhasilan Singapura dalam 4Ps (pencegahan, prosekusi/penghukuman, perlindungan, dan kerja sama) dianalisis dengan membandingkan Filipina dan India. Peran serta pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat berpengaruh pada penanganan perdagangan manusia. Kepadatan penduduk juga memengaruhi implementasi 4Ps. Faktor kebudayaan dan lingkungan juga berpengaruh pada respons masyarakat terhadap perdagangan manusia. Image nasional menjadi faktor penting dalam keberhasilan Singapura. Negara ini berusaha mempertahankan citra sebagai negara maju dengan kualitas hidup yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap SDGs, termasuk perdagangan manusia. Namun, Singapura masih menghadapi masalah perdagangan seks dan kerja paksa di Geylang. Meskipun ada kebijakan "yellow card", tetapi belum efektif. Kasus kerja paksa juga terus terjadi, terutama pada pekerja migran yang tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Pemerintah terlihat mengabaikan masalah ini. Status Singapura sebagai Tier 1 dalam TIP reports dan berhasil melawan perdagangan manusia harus dipertanyakan mengingat masalah yang masih ada. Tidak ada alasan yang bisa menormalisasi perdagangan manusia.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang Tua penulis Bapak Salahuddin Kasim dan Ibu Nirawana, serta Bapak Arief Wicaksono, S.IP.,M.A selaku dosen pembimbing 1, Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A selaku pembimbing 2, dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Aglipay-Villar, E. (2023, July 11). *Leading the fight against perdagangan manusia*. Retrieved from <https://www.philstar.com/opinion/2023/07/11/2280120/leading-fight-against-human-trafficking>
- Anti Slavery Law UK. (n.d.). *Anti Slavery in Domestic Legislation : Singapore*. Retrieved from <https://antislaverylaw.ac.uk/country/singapore/>
- Caballero-Anthony, M. (2018, September). *A Hidden Scourge*. Retrieved from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero>
- Caliwan, C. L. (2023, July 5). *Singapore hails PNP's efforts vs. perdagangan manusia*. Retrieved from Philippines News Agency: <https://www.pna.gov.ph/articles/1204964>
- CARRIL, L. (2023, November 1). *Rescue of 700 Trafficking Victims Spurs Probe into Philippine Police*. Retrieved from OCCRP: <https://www.occrp.org/en/daily/18174-rescue-of-700-trafficking-victims-spurs-probe-into-philippine-police>
- Channel News Asia. (2023, June 27). *Philippine police rescue more than 1,000 alleged trafficking victims, including Singaporeans*. Retrieved from Channel News Asia:

<https://www.channelnewsasia.com/asia/philippines-human-trafficking-victims-online-casino-manila-3589266>

Cooper, J. (2014, March 4). *PERDAGANGAN MANUSIA Sex and the Lion City*. Retrieved from Southeast Asia Globe: <https://southeastasiaglobe.com/12591-sex-and-the-lion-city-singapore-sex-workers-trafficking-geylang-southeast-asia-globe/>

Descalsota, M. (2022, May 11). *Inside Geylang, Singapore Red Light District*. Retrieved from Business Insider: <https://www.businessinsider.com/red-light-district-singapore-geylang-brothels-prostitution-tour-photos-2022-5>

Destiny Rescue. (n.d.). *The Philippines'*. Retrieved from <https://www.pna.gov.ph/articles/1204964>

Dianova. (2019, October 13). *Perdagangan manusia in India*. Retrieved from Dianova: <https://www.dianova.org/opinion/human-trafficking-in-india/>

Gehring, B. (2022, Juli 19). *What is the Trafficking in Persons Report?* Retrieved from Perdagangan manusia Institute: <https://traffickinginstitute.org/what-is-the-trafficking-in-persons-report/>

Giri, A. (2019, January 3). *What's Wrong with India's Efforts to Check Perdagangan manusia?* Retrieved from <https://thediplomat.com/2019/01/whats-wrong-with-indias-efforts-to-check-human-trafficking/>

Gramedia. (n.d.). *Pengertian Negara Maju: Ciri-Ciri, dan Contohnya* . Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-negara-maju/>

Gunawan, R. (2021, March 27). *Sebuah Kisah dari Geylang, Prostitusi Legal di Negeri Singa*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/komjenrg6756/605d592dd541df4029010172/sebuah-kisah-dari-geylang-prostitusi-legal-di-negeri-singa?page=all>

H.O.M.E. (2023). *2022 Annual Report*. Retrieved from H.O.M.E.: <https://static1.squarespace.com/static/5a12725612abd96b9c737354/t/64e41d465e10d818b1d22d07/1692671326642/2022+Annual+Report-compressed.pdf>

Hagar Singapore. (2018, Juni 2). *Perdagangan manusia in Singapore*. Retrieved from Hagar Singapore: <https://hagar.org.sg/human-trafficking-in-singapore/>

Intan, P. (2021, September 6). *Geylang, Wisata 18+ Legal di Singapura yang Kini Memilukan* . Retrieved from Detik Travel: <https://travel.detik.com/travel-news/d-5711145/geylang-wisata-18-legal-di-singapura-yang-kini-memilukan/2>

International Justice Mission. (2022, July 22). *US report gives PH highest ranking in fight vs. trafficking in persons*. Retrieved from <https://www.ijm.org.ph/articles/us-report-gives-ph-highest-ranking-in-fight-vs-trafficking-in-persons>

International Labour Organization. (2017, September). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm

Kass, H. (2023, July 3). *Philippine Police Rescue 2,700 Victims of Perdagangan manusia Cyber Scam*. Retrieved from MSSP Alert: <https://www.msspalert.com/news/philippine-police-rescue-2700-victims-of-human-trafficking-cyber-scam>

Kotiswaran, P. (2019). Trafficking: A Development Approach. *Current Legal Problems, Volume 72, Issue 1*, 375-416.

Krishnan, M. (2021). *An Analysis of Police Approaches Towards Perdagangan manusia in India*. Retrieved from https://www.policefoundationindia.org/images/resources/pdf/An_Analysis_of_Police_Approaches_Towards_Human_Trafficking_in_India.pdf

La Trobe University. (2020, August). *Does Singapore have a perdagangan manusia problem?* Retrieved from La Trobe University: <https://www.latrobe.edu.au/news/announcements/2020/does-singapore-have-a-human-trafficking-problem>

Lift International. (2019, April 17). *The 4 Ps*. Retrieved from Lift International: <https://www.liftinternational.org/blog/2019/4/17/the-4-ps>

Ministry of Home Affairs Singapore. (n.d.). *Partnerships*. Retrieved from Ministry of Home Affairs Singapore: <https://www.mha.gov.sg/what-we-do/combating-trafficking-in-persons/partnership-international-efforts>

Ministry of Home Affairs. (n.d.). *ANTI TRAFFICKING CELL*. Retrieved from https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/Women_Safety_Division/anti-trafficking-cell#:~:text=The%20Government%20of%20India%20has,Nirbhaya%20Fund%27%20has%20been%20approved.

Ministry of Manpower Singapore. (2023). *Foreign workforce numbers*. Retrieved from <https://www.mom.gov.sg/documents-and-publications/foreign-workforce-numbers>

Misti, D. (2018). *ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM UPAYA MENANGANI KASUS TRAFFICKING IN PERSONS PADA TAHUN 2015- 2017*.

Parker, L. (2022, May 16). *Perdagangan manusia in India*. Retrieved from <https://theexodusroad.com/human-trafficking-in-india/>

Project X. (n.d.). *Sex Work in ASEAN: Singapore*. Retrieved from Project X: <https://theprojectx.org/sex-work-in-asean-singapore/>

Rebecca. (2021, October 12). *Sex Workers Expose the Harsh Realities of Singapore's Sex Trade | Politics of Sex*. (V. Asia, Interviewer)

Rybarczyk, K. (2022, September 20). *For Indian Girls, 'Every Case of Trafficking Is a Failed Revolution'*. Retrieved from <https://thedi diplomat.com/2022/09/for-indian-girls-every-case-of-trafficking-is-a-failed-revolution/>

Singapore Legal Advice. (2021, June 10). *The Offence of Perdagangan manusia in Singapore and Its Penalties*. Retrieved from Singapore Legal Advice: <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/offence-human-trafficking-singapore-penalties/>

The 4Ps. (2019, April 17). Retrieved from Lift International: <https://www.liftinternational.org/blog/2019/4/17/the-4-ps>

The Straits Time. (2014, February 10). *Study sheds light on perdagangan seks in Singapore*. Retrieved from The Straits Time: <https://www.straitstimes.com/singapore/study-sheds-light-on-sex-trafficking-in-singapore>

The Straits Time. (2023, June 27). *Philippine police rescue more than 1,000 alleged trafficking victims, including Singaporeans*. Retrieved from The Straits Time: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-police-rescue-over-1000-alleged-trafficking-victims-including-singaporeans>

Trafficking Victims Protection Act. (2022, Juli 19). Retrieved from Fight Slavery Now: <https://fightslaverynow.org/why-fight-there-are-27-million-reasons/the-law-and-trafficking/trafficking-victims-protection-act/trafficking-victims-protection-act>

Transient Workers Count Too. (2023, Juni 3). Retrieved from Is Singapore being scolded by the ILO?: <https://twc2.org.sg/2023/06/03/is-singapore-being-scolded-by-the-ilo/>

Transient Workers Count Too (TWC2). (2021, November 13). *TWC2 and HOME submit a compliance report on Singapore for ICERD*. Retrieved from <https://twc2.org.sg/2021/11/13/twc2-and-home-submit-a-compliance-report-on-singapore-for-icerd/>

Transient Workers Count Too (TWC2). (2022, September 12). *How Singapore abets forced labour*. Retrieved from <https://twc2.org.sg/2022/09/12/how-singapore-abets-forced-labour/>

United Nations Office of Drugs and Crime. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (New York, 15 November 2000) OBJECTIVES*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000_Protocol_to_Prevent_2C_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons.pdf

United States Government. (n.d.). *3Ps: Prosecution, Protection, and Prevention*. Retrieved from United States Government: <https://www.state.gov/3ps-prosecution-protection-and-prevention/>

Yea, S. (2020). *Paved with Good Intentions? Perdagangan manusia and the Anti-Trafficking Movement in Singapore*. Singapore: Springer Nature Singapore.

Yilma, K. (2023). *The National Image Theory*.